



STRATEGI PENGUATAN IMPLEMENTASI UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PENGUKURAN LITERASI BERBAHASA INDONESIA PADA KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN

Reza Hutomo¹, Bambang Giyanto²

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2}

reza.badanbahasa@gmail.com¹, bambang_giyanto07@yahoo.com²

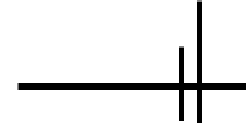
Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Indonesian Language Proficiency Test (UKBI) as an instrument for measuring Indonesian language literacy at the Language Center in Banten and to formulate strategies for strengthening its implementation. This study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews with ten informants consisting of UKBI managers and implementers at the central and regional levels as well as UKBI service users, complemented by document analysis and UKBI implementation data. Policy implementation was analyzed using the Van Meter and Van Horn model, which consists of policy standards and objectives, resources, characteristics of the implementing agency, interorganizational communication and enforcement activities, social, economic and political conditions, and the disposition of implementers. The findings show that UKBI implementation at the Language Center in Banten has been supported by established standards, role distribution, procedures, and coordination mechanisms. However, implementation continues to face limitations in human resources, infrastructure readiness, the wide service area, and increasing demand for services. In terms of communication, information regarding UKBI procedures has generally reached service users, but understanding of proficiency categories and follow-up actions based on test results remains limited. These findings indicate that UKBI should not merely function as a testing service but needs to be strengthened as a data-based policy instrument. The proposed strategies include strengthening implementer capacity, expanding access and infrastructure support, improving communication and follow-up of UKBI results, and integrating UKBI data into the planning and evaluation of Indonesian language literacy programs.

Keywords: *policy implementation; strategy; UKBI; Indonesian language literacy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai instrumen pengukuran literasi berbahasa Indonesia pada Kantor Bahasa Provinsi Banten serta merumuskan strategi penguatan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap sepuluh informan yang terdiri atas pengelola dan pelaksana UKBI pada tingkat pusat dan daerah serta pengguna layanan UKBI, dilengkapi dengan studi dokumentasi dan data hasil pelaksanaan UKBI. Analisis implementasi menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penguatan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UKBI di Kantor Bahasa Provinsi Banten telah memiliki standar, pembagian peran, prosedur, dan mekanisme koordinasi yang mendukung penyelenggaraan layanan. Namun, implementasi



masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana, luasnya wilayah kerja, serta peningkatan permintaan layanan. Dari sisi komunikasi, informasi mengenai prosedur pelaksanaan UKBI relatif telah diterima oleh pengguna layanan, tetapi pemahaman mengenai makna predikat dan tindak lanjut hasil UKBI masih perlu diperkuat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa UKBI belum cukup ditempatkan sebagai layanan pengujian, tetapi perlu dikembangkan sebagai instrumen kebijakan berbasis data. Strategi penguatan implementasi diarahkan pada penguatan kapasitas pelaksana, perluasan akses dan dukungan infrastruktur, penguatan komunikasi dan tindak lanjut hasil UKBI, serta integrasi data hasil UKBI dalam perencanaan dan evaluasi program literasi berbahasa Indonesia.

Kata kunci: implementasi kebijakan; strategi; UKBI; literasi berbahasa Indonesia

PENDAHULUAN

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia. Keberadaan UKBI tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pengujian, tetapi juga dengan penyediaan informasi mengenai tingkat kemahiran berbahasa yang dapat digunakan dalam berbagai kepentingan pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan kemampuan berbahasa. Peserta yang mengikuti UKBI memperoleh hasil dalam bentuk sertifikat dan dipetakan berdasarkan tingkat kemahiran berbahasa.

Dalam konteks kebijakan publik, keberadaan instrumen pengukuran menjadi penting apabila informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. UKBI dengan demikian tidak hanya dapat dipandang sebagai layanan pengujian kemampuan berbahasa, tetapi juga sebagai sumber informasi yang dapat mendukung pemetaan kondisi kemahiran berbahasa masyarakat. Posisi tersebut sejalan dengan kebutuhan pengembangan kebijakan literasi yang semakin membutuhkan data yang terukur.

Secara nasional, penyelenggaraan UKBI menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta UKBI Adaptif selama periode 2021–2025 telah mencapai 1.321.298 peserta. Di wilayah kerja Kantor Bahasa Provinsi Banten yang meliputi Provinsi Banten dan Jakarta, jumlah peserta juga mengalami peningkatan dari 11.454 peserta pada 2021 menjadi 22.687 peserta pada 2025. Peningkatan jumlah peserta tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan terhadap layanan UKBI. Namun, peningkatan jumlah peserta belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa implementasi UKBI telah berjalan optimal sebagai instrumen kebijakan. Penyelenggaraan UKBI masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana, jaringan internet, perangkat pendukung, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil UKBI dalam program pembinaan literasi.

Kondisi tersebut semakin relevan ketika UKBI dilihat pada tingkat pelaksana daerah. Kantor Bahasa Provinsi Banten memiliki wilayah kerja yang mencakup Provinsi Banten dan Jakarta. Perluasan wilayah kerja tersebut memberikan konsekuensi terhadap cakupan pelayanan dan kebutuhan koordinasi organisasi. Di sisi lain, tim kerja UKBI pada Kantor Bahasa Provinsi Banten pada tahun 2025 hanya didukung oleh satu orang petugas inti dengan jabatan Widyabasa Ahli Pertama. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, petugas tersebut memperoleh dukungan dari pegawai tim kerja lain, antara lain tim literasi, kamus, dan penerjemahan.



Persoalan implementasi juga tidak hanya berada pada sisi penyelenggara. Hasil wawancara dengan pengguna layanan menunjukkan bahwa informasi mengenai UKBI telah diperoleh melalui berbagai saluran, seperti sekolah, lembaga, pihak yang mengoordinasikan peserta, maupun informasi langsung kepada calon peserta. Informasi tersebut membantu peserta memahami proses pendaftaran dan pelaksanaan UKBI. Namun, temuan lain menunjukkan adanya kebutuhan informasi yang lebih lanjut, khususnya mengenai arti predikat yang diperoleh dan apa yang sebaiknya dilakukan setelah menerima hasil UKBI. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan komunikasi dalam implementasi UKBI bukan semata-mata berkaitan dengan tersampainya informasi mengenai layanan. Persoalan yang lebih substantif adalah apakah informasi yang disampaikan telah memungkinkan kelompok sasaran memahami fungsi hasil pengukuran dan memanfaatkannya untuk pengembangan kemampuan berbahasa. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara komunikasi mengenai cara mengikuti UKBI dan komunikasi mengenai makna serta pemanfaatan hasil UKBI.

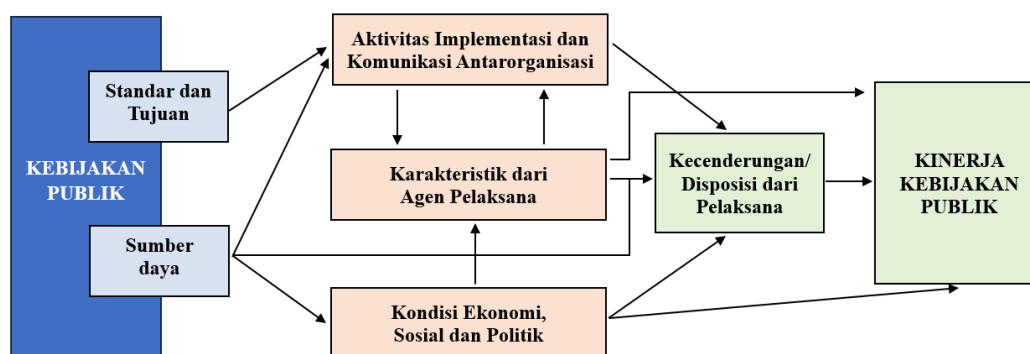
Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut perlu dianalisis secara lebih menyeluruh. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penguatan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Keenam variabel tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana UKBI diterjemahkan dan dilaksanakan pada tingkat daerah. Penelitian ini memandang UKBI bukan sebagai alat ukur seluruh dimensi literasi. Literasi memiliki cakupan yang lebih luas daripada kemahiran berbahasa, sedangkan UKBI secara khusus menyediakan informasi mengenai kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, hubungan UKBI dengan literasi dalam penelitian ini ditempatkan pada kontribusinya dalam menyediakan informasi mengenai kemahiran berbahasa sebagai salah satu bagian penting dalam penguatan literasi berbahasa Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UKBI sebagai instrumen pengukuran literasi berbahasa Indonesia pada Kantor Bahasa Provinsi Banten, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta merumuskan strategi penguatan implementasi UKBI.

KAJIAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam praktik.

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penguatan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana.



Gambar 1. Model Van Metter & Van Horn (Sumber: Adaptasi dari Van Metter & Van Horn, 1975)

Keenam variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, model Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis implementasi UKBI pada Kantor Bahasa Provinsi Banten. Standar dan sasaran digunakan untuk melihat kejelasan arah kebijakan UKBI; sumber daya digunakan untuk melihat kecukupan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan dukungan lainnya; karakteristik badan pelaksana digunakan untuk melihat struktur dan kapasitas organisasi; komunikasi digunakan untuk melihat koordinasi dan penyampaian informasi; kondisi sosial, ekonomi dan politik digunakan untuk melihat lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan; sedangkan disposisi pelaksana digunakan untuk melihat pemahaman, penerimaan, dan komitmen pelaksana.

UKBI sebagai Instrumen Pengukuran

UKBI diposisikan sebagai instrumen untuk memperoleh informasi mengenai kemahiran berbahasa Indonesia. Hasil UKBI memberikan pemetaan tingkat kemahiran peserta berdasarkan predikat tertentu. Dengan demikian, hasil pengukuran dapat memberikan informasi yang lebih terukur dibandingkan penilaian yang hanya didasarkan pada persepsi. Dalam perspektif kebijakan publik, informasi hasil pengukuran memiliki nilai apabila digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, implementasi UKBI perlu dilihat tidak hanya dari kemampuan penyelenggara melaksanakan tes, tetapi juga dari kemampuan kebijakan menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta, lembaga pendidikan, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Penelitian sebelumnya mengenai UKBI menunjukkan bahwa kajian UKBI banyak berfokus pada aspek teknis, pengelompokan predikat, pelatihan, maupun komunikasi program. Misalnya, penelitian Rahadian, Candradewini, dan Munajat (2022) menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi UKBI telah berjalan, tetapi masih menghadapi kendala berupa sosialisasi yang belum merata serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian mengenai UKBI sebagai instrumen pengukuran juga menunjukkan bahwa UKBI dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan berbahasa peserta, tetapi kajian mengenai implementasinya sebagai instrumen kebijakan pada tingkat kantor bahasa masih perlu diperkuat. Atas dasar itu, penelitian ini menempatkan UKBI dalam perspektif implementasi kebijakan publik dengan fokus pada pelaksanaan di Kantor Bahasa Provinsi Banten.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pemilihan Kantor Bahasa Provinsi Banten sebagai lokus penelitian didasarkan pada perannya sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang menyelenggarakan UKBI serta cakupan wilayah kerjanya yang meliputi Provinsi Banten dan Jakarta. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatan UKBI. Informan IF01 sampai dengan IF05 berasal dari unsur pengelola dan pelaksana UKBI pada tingkat pusat dan daerah, sedangkan IF06 sampai dengan IF10 merupakan pengguna layanan yang pernah mengikuti UKBI di Kantor Bahasa Provinsi Banten.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen organisasi, dokumen pelaksanaan UKBI, serta data hasil pelaksanaan UKBI. Data tersebut digunakan untuk memperkuat dan memeriksa kesesuaian informasi yang diperoleh melalui wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis substantif menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri atas enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas penguatan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Kerangka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kondisi implementasi, faktor pendukung dan penghambat, kemudian menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan implementasi UKBI. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi dokumen. Informasi dari hasil wawancara dibandingkan dengan informasi dari informan lain serta dokumen yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya didasarkan pada pandangan satu informan. Metode penelitian tersebut sesuai dengan rancangan penelitian yang menggunakan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran merupakan variabel pertama dalam model Van Meter dan Van Horn. Kejelasan standar dan sasaran diperlukan agar pelaksana memiliki arah yang sama dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan operasional. Dalam konteks UKBI, standar kemahiran berbahasa Indonesia telah memiliki dasar regulasi, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan UKBI sebagai instrumen pengukuran kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan standar dan pedoman memberikan dasar bagi pelaksana dalam menyelenggarakan UKBI. Pada tingkat organisasi daerah, UKBI ditempatkan sebagai salah satu layanan kebahasaan Kantor Bahasa. Pelaksanaan UKBI juga didukung oleh prosedur operasional yang mengatur kegiatan organisasi, termasuk prosedur diseminasi atau sosialisasi UKBI. Dengan demikian, dari sisi standar dan sasaran, implementasi UKBI telah memiliki kerangka kebijakan dan operasional yang cukup jelas. Persoalan yang muncul bukan terutama pada ketiadaan standar, tetapi pada bagaimana standar tersebut diterjemahkan menjadi layanan yang mampu menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi kelompok sasaran.



Hal ini menjadi penting karena tujuan pengukuran tidak berhenti pada penerbitan hasil, tetapi juga pada penggunaan informasi hasil pengukuran.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi UKBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu persoalan utama pada tingkat daerah. Pada tahun 2025, Kantor Bahasa Provinsi Banten memiliki satu orang petugas inti yang menangani UKBI. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, petugas tersebut memperoleh bantuan dari pegawai tim kerja lain. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi semakin penting karena wilayah kerja Kantor Bahasa Provinsi Banten meliputi Banten dan Jakarta. Pada saat yang sama, permintaan terhadap layanan UKBI mengalami peningkatan. NS02 menjelaskan bahwa jumlah peserta dalam satu sesi bahkan dapat mencapai ratusan orang. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap koordinasi, pengelolaan jadwal, pendampingan, dan dukungan teknis.

Selain sumber daya manusia, implementasi UKBI menghadapi persoalan sarana dan prasarana. Jaringan internet belum selalu stabil, perangkat komputer atau laptop dan headset tidak selalu tersedia bagi peserta, dan fasilitas laboratorium bahasa belum tersedia secara merata di sekolah-sekolah di wilayah Banten dan Jakarta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan layanan UKBI harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya. Peningkatan jumlah peserta tanpa penguatan kapasitas pelaksana dan infrastruktur berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan.

Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, mekanisme kerja, dan kapasitas organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan UKBI memiliki pembagian peran antara tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat terdapat fungsi pengelolaan dan pengembangan UKBI, sedangkan Kantor Bahasa menjalankan layanan kepada kelompok sasaran di wilayah kerjanya. NS02 menyampaikan bahwa alur kerja UKBI dari pusat sampai daerah telah tersusun secara terstruktur. Kantor Bahasa Provinsi Banten juga memiliki perangkat prosedur operasional. POS AP Generik memuat berbagai prosedur kegiatan organisasi, termasuk diseminasi atau sosialisasi UKBI dan penyuluhan kemahiran berbahasa Indonesia. Keberadaan prosedur tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan UKBI telah ditempatkan dalam mekanisme kerja organisasi.

Namun demikian, struktur organisasi yang telah tersedia menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas. Luasnya wilayah kerja dan peningkatan permintaan layanan menciptakan ketidakseimbangan antara beban pelayanan dan kapasitas personel. Organisasi masih dapat mempertahankan layanan melalui pembagian sesi peserta, pelibatan personel lain, dan koordinasi dengan tingkat pusat, tetapi kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas organisasi apabila layanan UKBI terus diperluas.

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Penguatan

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi UKBI karena penyelenggaraannya melibatkan tingkat pusat, kantor bahasa, lembaga pendidikan, dan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi telah berjalan melalui hubungan pusat dan daerah, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama



dengan lembaga pendidikan dan pihak lainnya. Pada tingkat pengguna layanan, NS06 sampai dengan NS09 pada dasarnya telah memperoleh informasi mengenai UKBI sebelum mengikuti tes. Informasi diperoleh melalui sekolah, lembaga, pihak yang mengoordinasikan peserta, maupun secara langsung. Informasi tersebut membantu peserta memahami proses pendaftaran dan pelaksanaan UKBI. Namun, temuan NS10 memberikan gambaran yang lebih kritis. Informasi yang diterima peserta belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman mengenai fungsi dan pemanfaatan hasil UKBI. Peserta masih membutuhkan penjelasan mengenai arti predikat yang diperoleh dan langkah yang dapat dilakukan setelah memperoleh hasil.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi implementasi UKBI perlu dibedakan menjadi dua tahap. Pertama, komunikasi layanan yang menjelaskan bagaimana peserta memperoleh dan mengikuti UKBI. Kedua, komunikasi kebijakan yang menjelaskan makna hasil pengukuran dan bagaimana hasil tersebut dapat digunakan. Selama ini tahap pertama relatif telah berjalan, sedangkan tahap kedua masih membutuhkan penguatan. Dengan demikian, penguatan komunikasi tidak cukup dilakukan melalui penambahan kegiatan sosialisasi. Materi komunikasi juga perlu diarahkan pada interpretasi hasil dan tindak lanjut. Peserta perlu memahami bahwa predikat UKBI bukan hanya informasi mengenai hasil tes, tetapi dapat menjadi informasi mengenai posisi kemampuan berbahasa dan dasar untuk menentukan kebutuhan pengembangan kemampuan selanjutnya. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi komunikasi UKBI telah berjalan tetapi masih menghadapi persoalan pemerataan sosialisasi dan dukungan sarana prasarana.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan menjadi faktor yang turut menentukan kemampuan kebijakan menjangkau kelompok sasaran. Dalam implementasi UKBI, karakteristik wilayah kerja Kantor Bahasa Provinsi Banten menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan. Wilayah kerja mencakup Provinsi Banten dan Jakarta sehingga karakteristik kelompok sasaran, lembaga pendidikan, dan kebutuhan pelayanan bersifat beragam. Selain kondisi wilayah, akses teknologi juga menjadi bagian dari lingkungan implementasi. Ketidakmerataan jaringan internet, perangkat komputer, headset, dan laboratorium bahasa dapat memengaruhi kemampuan kelompok sasaran untuk mengikuti UKBI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UKBI tidak sepenuhnya berada dalam kendali organisasi pelaksana.

Di sisi lain, dukungan lembaga pendidikan menjadi peluang bagi perluasan implementasi. Kantor Bahasa dapat menggunakan sekolah dan lembaga pendidikan sebagai mitra dalam menjaring peserta dan memperluas sosialisasi. Hal tersebut juga terlihat dalam praktik koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten serta penjangkauan peserta melalui guru pendamping. Dengan demikian, kondisi lingkungan menghadirkan sekaligus peluang dan hambatan. Luasnya wilayah dan ketidakmerataan infrastruktur menjadi tantangan, sedangkan dukungan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah menjadi modal untuk memperluas jangkauan layanan.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana berkaitan dengan pemahaman, sikap, penerimaan, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Dalam pelaksanaan UKBI, disposisi menjadi penting karena



keterbatasan sumber daya menuntut adanya kemampuan pelaksana untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UKBI tetap dapat berjalan meskipun terdapat keterbatasan kapasitas personel. Pelibatan pegawai dari tim kerja lain dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan menunjukkan adanya dukungan internal terhadap pelaksanaan layanan UKBI. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya belum menghentikan pelaksanaan UKBI. Namun, ketergantungan terhadap dukungan personel lintas tim juga menunjukkan bahwa keberlanjutan implementasi perlu didukung dengan penguatan kapasitas yang lebih terstruktur. Komitmen pelaksana perlu didukung oleh pembagian tugas, kapasitas, dan dukungan organisasi yang memadai agar pelaksanaan UKBI tidak hanya bergantung pada upaya individual pelaksana.

Strategi Penguatan Implementasi UKBI

Berdasarkan hasil analisis terhadap enam variabel implementasi Van Meter dan Van Horn, strategi penguatan implementasi UKBI perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah peserta, tetapi pada penguatan keseluruhan rantai implementasi mulai dari kapasitas pelaksana, akses layanan, komunikasi, hingga pemanfaatan hasil pengukuran.

Penguatan kapasitas pelaksana

Keterbatasan jumlah petugas inti UKBI menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia pada tingkat daerah. Strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan jumlah dan pemerataan kompetensi pelaksana, memperkuat pelatihan teknis, serta mengembangkan mekanisme dukungan lintas tim yang lebih terencana. Penguatan tersebut diperlukan agar peningkatan jumlah peserta tidak menimbulkan beban pelayanan yang tidak sebanding dengan kapasitas organisasi.

Perluasan akses dan dukungan infrastruktur

Kendala jaringan, perangkat, dan fasilitas laboratorium menunjukkan bahwa perluasan UKBI harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur kelompok sasaran. Strategi dapat diarahkan melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah yang memiliki fasilitas memadai. Dengan demikian, perluasan peserta tidak hanya dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, tetapi juga melalui penyediaan lingkungan pengujian yang mendukung.

Penguatan komunikasi dan tindak lanjut hasil UKBI

Temuan IF10 menunjukkan bahwa komunikasi mengenai UKBI perlu dikembangkan dari informasi prosedural menjadi komunikasi yang menjelaskan makna hasil dan tindak lanjutnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang lebih sederhana mengenai predikat UKBI, memberikan penjelasan mengenai posisi kemampuan berbahasa peserta, serta menyediakan informasi mengenai pilihan pengembangan kemampuan setelah memperoleh hasil. Strategi tersebut penting karena peserta yang mengetahui cara mengikuti tes belum tentu mengetahui bagaimana menggunakan informasi yang diperoleh dari hasil tes. Oleh karena itu, komunikasi hasil perlu menjadi bagian dari keseluruhan layanan UKBI.

Integrasi data UKBI dalam program literasi

UKBI menghasilkan data mengenai tingkat kemahiran berbahasa peserta. Data tersebut dapat dikembangkan menjadi informasi agregat yang digunakan untuk memetakan kebutuhan pembinaan literasi pada kelompok atau satuan pendidikan tertentu. Dengan cara tersebut,



UKBI dapat bergerak dari fungsi pengukuran individual menuju fungsi pendukung perencanaan dan evaluasi program. Integrasi data tidak berarti menjadikan UKBI sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan literasi. UKBI tetap digunakan untuk mengukur aspek kemahiran berbahasa, sedangkan hasilnya menjadi salah satu sumber informasi dalam penyusunan intervensi literasi. Posisi tersebut sesuai dengan batasan konseptual penelitian bahwa UKBI tidak mengukur seluruh dimensi literasi, tetapi memberikan informasi mengenai kemahiran berbahasa sebagai salah satu unsur penting dalam literasi berbahasa Indonesia.

Dengan demikian, strategi penguatan implementasi UKBI dapat digambarkan sebagai perubahan orientasi dari *testing-oriented service* menjadi *data-informed language policy*. UKBI tidak berhenti pada proses pengujian dan penerbitan hasil, tetapi menghasilkan informasi yang dipahami, ditindaklanjuti, dan digunakan dalam perencanaan serta evaluasi program literasi.

PENUTUP

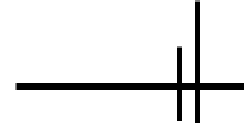
1. Kesimpulan

Implementasi UKBI pada Kantor Bahasa Provinsi Banten telah didukung oleh standar kebijakan, pembagian peran antara tingkat pusat dan daerah, prosedur operasional, mekanisme koordinasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Kondisi tersebut memungkinkan layanan UKBI tetap berjalan meskipun menghadapi peningkatan jumlah peserta dan cakupan wilayah kerja yang luas. Namun demikian, implementasi UKBI masih menghadapi beberapa hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan penting karena penyelenggaraan UKBI pada tingkat daerah masih didukung oleh jumlah petugas inti yang terbatas. Hambatan lain terdapat pada kesiapan sarana dan prasarana, khususnya jaringan internet, perangkat pendukung, dan fasilitas laboratorium bahasa. Luasnya wilayah kerja juga meningkatkan kebutuhan koordinasi dan kapasitas pelayanan.

Pada aspek komunikasi, informasi mengenai prosedur pendaftaran dan pelaksanaan UKBI relatif telah diterima oleh peserta. Akan tetapi, temuan IF10 menunjukkan bahwa pemahaman mengenai makna predikat dan tindak lanjut hasil UKBI masih perlu diperkuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi implementasi UKBI perlu bergeser dari sekadar penyampaian informasi layanan menuju komunikasi mengenai manfaat dan pemanfaatan hasil pengukuran. Berdasarkan kondisi tersebut, strategi penguatan implementasi UKBI diarahkan pada empat aspek, yaitu penguatan kapasitas pelaksana, perluasan akses dan dukungan infrastruktur, penguatan komunikasi dan tindak lanjut hasil UKBI, serta integrasi data UKBI dalam perencanaan dan evaluasi program literasi berbahasa Indonesia. Strategi tersebut diperlukan agar UKBI tidak berhenti sebagai instrumen pengujian, tetapi dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai instrumen kebijakan berbasis data.

2. Saran

Penguatan implementasi UKBI perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas organisasi daerah dan karakteristik kelompok sasaran. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu memperkuat dukungan terhadap pelaksana daerah, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan sistem pemanfaatan hasil UKBI. Kantor Bahasa Provinsi Banten perlu memperkuat kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya untuk memperluas akses serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai UKBI. Selain itu, komunikasi kepada

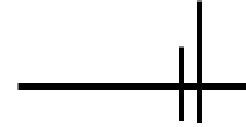


peserta perlu mencakup penjelasan mengenai arti predikat dan tindak lanjut yang dapat dilakukan setelah memperoleh hasil. Data UKBI juga perlu dikembangkan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam perencanaan dan evaluasi program literasi berbahasa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Pedoman Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Panduan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif (UKBI Adaptif) bagi peserta*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Data partisipasi UKBI Adaptif tahun 2021–2025*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2025*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Bachman, L. F. (1990). *Fundamental considerations in language testing*. Oxford University Press.
- Dennis, A., dkk. (2022). *Artikel mengenai klasifikasi hasil UKBI menggunakan metode Naive Bayes*.
- Gee, J. P. (1996). *Social linguistics and literacies: Ideology in discourses*. Falmer Press.
- Halliday, M. A. K. (1978). *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*. Edward Arnold.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Ibrahim, G. A., dkk. (2016). *Pedoman Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Krashen, S. D. (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. Pergamon Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Nugroho, A., dkk. (2024). *Pendampingan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) sebagai upaya eksistensi bahasa Indonesia siswa*. Jurnal Cemerlang: Pengabdian pada Masyarakat, 6(2), 227–238.
- OECD. (2019). *PISA 2018 assessment and analytical framework: Reading, mathematics and science*. OECD Publishing.
- Pratama. (2021). *Artikel mengenai UKBI Language Clinic*.
- Rahadian, Candradewini, & Munajat. (2022). *Artikel mengenai implementasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia*.
- Solihah, A., dkk. (2021). *Panduan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif (UKBI Adaptif) bagi peserta*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Tarigan, H. G. (2008). *Membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa*. Angkasa.
- UNESCO. (2017). *Reading the past, writing the future: Fifty years of promoting literacy*. UNESCO.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. Administration & Society, 6(4), 445–488.
- Yulianti, & Puspito. (2018). *Artikel mengenai pengembangan UKBI berbasis Android*.

**Peraturan**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kebahasaan dan kesastraan.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.